

LAPORAN INTERIM TRIWULAN I BALAI POM DI MAMUJU

20

20 22

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan I Tahun 2022 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara periodik triwulan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Triwulan I Tahun 2022.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program dan

kegiatan terhadap target kinerja, analisis atas efisiensi, penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2022 dapat tercapai.

Mamuju, 20 April 2022
Kepala Balai POM di Mamuju,



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5. Analisis Lingkungan Strategis.....	8
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Budaya Organisasi.....	26
2.3 Tujuan	27
2.4 Sasaran Strategis.....	28
2.5 Rencana Kerja Tahunan	43
2.6 Perjanjian Kinerja	49
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	55
2.8 Kerangka Pendanaan.....	66
2.9. Metode Pengukuran.....	72
BAB III.....	76
AKUNTABILITAS KINERJA	76
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	76
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	87
3.6 Realisasi Anggaran	148
3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	156

BAB IV	165
PENUTUP	165
4.1 Kesimpulan.....	165
4.2 Saran.....	168
LAMPIRAN.....	169

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Mamuju Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Tujuan dan sasaran Balai POM di Mamuju dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan sebagai input kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran dalam DIPA Tahun 2022 Rp22,014,685,000.00 dengan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp1,890,709,603.00 atau 8.59%.

Pada Triwulan I Tahun 2022, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 22 kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen DIPA. Sampai dengan triwulan I Terdapat 1 Sasaran Kegiatan dengan kriteria SANGAT BAIK yaitu:

- SK7 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

2 (dua) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Adapun hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 91.03% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM di

Mamuju dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2022

- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun BPOM di Mamuju sampai triwulan I tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun triwulan I tahun 2022 Balai POM di Mamuju telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 90,61% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 112.76% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 140.70% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis ketujuh sebesar 175.00% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun sampai dengan triwulan I Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022, namun sampai dengan triwulan I tahun 2022 Balai POM di Mamuju tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
- Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 73.33% dengan kriteria CUKUP. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang akan tercapai di akhir tahun 2022, untuk indikator dengan nilai CUKUP Balai POM di Mamuju harus melakukan upaya yang lebih agar dapat mencapai target tahun 2022. Sedangkan untuk indikator yang capaian di akhir tahun Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan dalam rangka untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 210.66% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan Tata Kelola Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel.
- Dari 22 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 8 kegiatan yang Tidak Efisien. Namun secara total capaiannya telah efisien. Terkait dengan kegiatan yang tidak efisien hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang selisih antara realisasi kegiatan dan anggarannya terlalu tinggi. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Mamuju.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SKP di SIASN yang memfasilitasi cascading indikator kinerja hingga level individu.
- Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua kelompok substansi
- Sebagian besar ASN milenial yang responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan
- Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor yang baik

Balai POM di Mamuju terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun pada triwulan mendatang sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Mamuju, 20 April 2022
Kepala Balai POM di Mamuju,



Lintang Purnama Jaya, S.Farm., Apt.,M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM disebutkan bahwa jenis laporan kinerja yang dilaporkan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja triwulanan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) triwulan, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan. Selain itu dijelaskan terkait kendala atau hambatan dan rencana tindak lanjutnya. Adanya laporan kinerja interim diharapkan target tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan dan hambatan-hambatan di tahun berjalan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Dengan adanya perbaikan diberbagai bidang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Balai POM di Mamuju merupakan salah satu UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy III dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Mamuju yang berlokasi di Kabupaten Mamuju memiliki cakupan wilayah pengawasan sebanyak 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar (Perka BPOM No 23 Tahun 2021).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijelaskan Balai POM di Mamuju mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

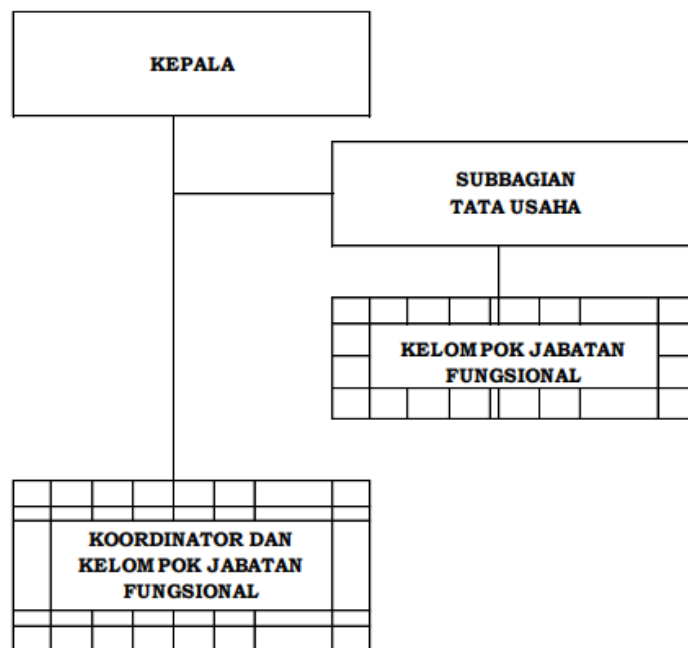
Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.1 di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju
Sumber: Perka BPOM No 22 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 4 (empat) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi

pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

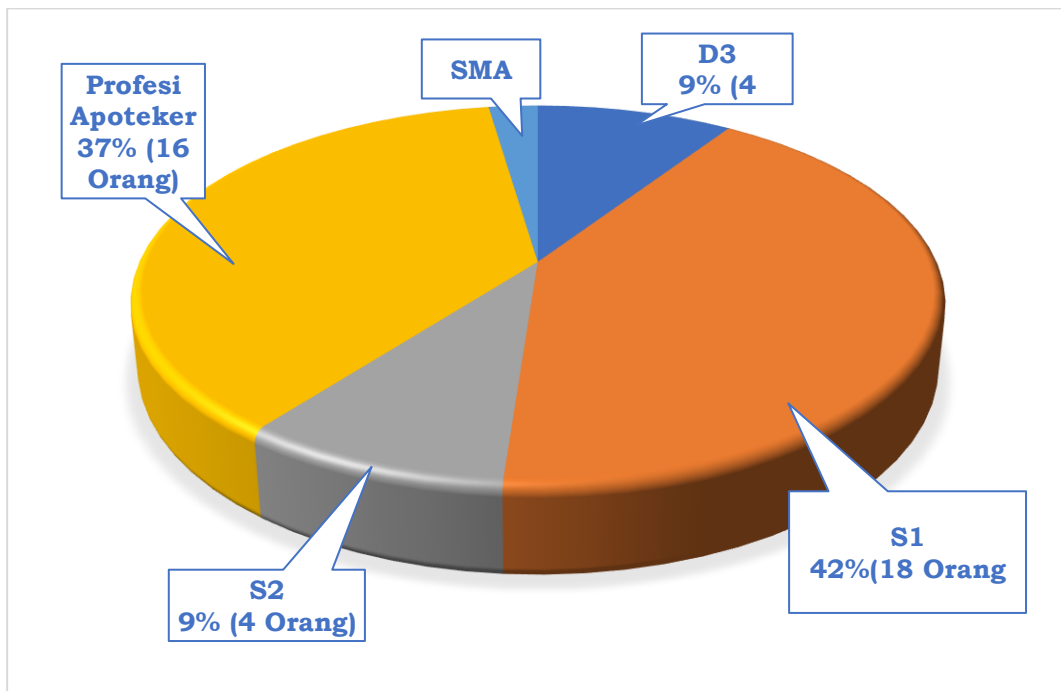
Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2022 sejumlah 43 orang dengan proporsi 56,82% perempuan dan 43,18% laki-laki. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai POM di Mamuju Tahun 2022

Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju Diolah Penyusun, 2022

Sumber Daya Lainnya

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri. Dalam melaksanakan operasional kegiatan Balai POM di Mamuju telah menempati Gedung Baru yang beralamat di Jalan Poros Kalukku KM 13 Desa Bambu. Gedung ini didirikan diatas tanah dengan luas 9109m². Gedung yang ditempati untuk operasional kegiatan perkantoran saat ini merupakan realisasi pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi) dengan luas bangunan sebesar 1555.2 m².

Rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu Gedung Kantor dan Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

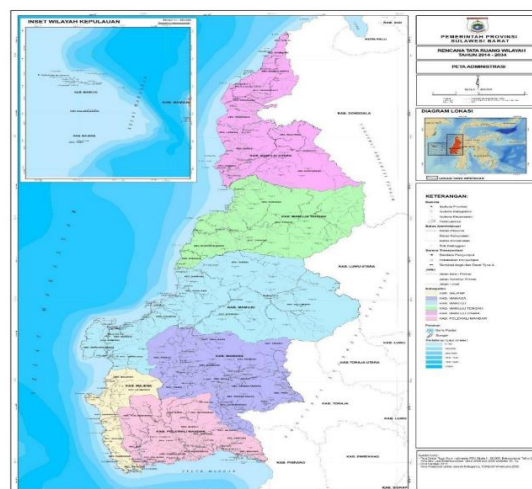
Namun adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 menyebabkan kerusakan berat pada Gedung Laboratorium Mikrobiologi dan kerusakan ringan pada Gedung Laboratorium Pangan dan Teranokoko. Sehingga sebagian besar pengujian masih harus dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar. Selain itu Balai POM di Mamuju mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Anggaran

Anggaran Balai POM di Mamuju bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.419578/2022 yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp22.014.685.000 (Dua Puluh Dua Miliar Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Selama triwulan I tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA namun tidak mengurangi jumlah alokasi anggaran antar belanja pegawai.

Eksternal

Letak Geografis



Gambar 1.3 Peta Provinsi Sulawesi Barat
Sumber: Sulbarprov.go.id, 2022

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km persegi (sulbar.bps.go.id, 2020). Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (sulbar.bps.go.id). Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

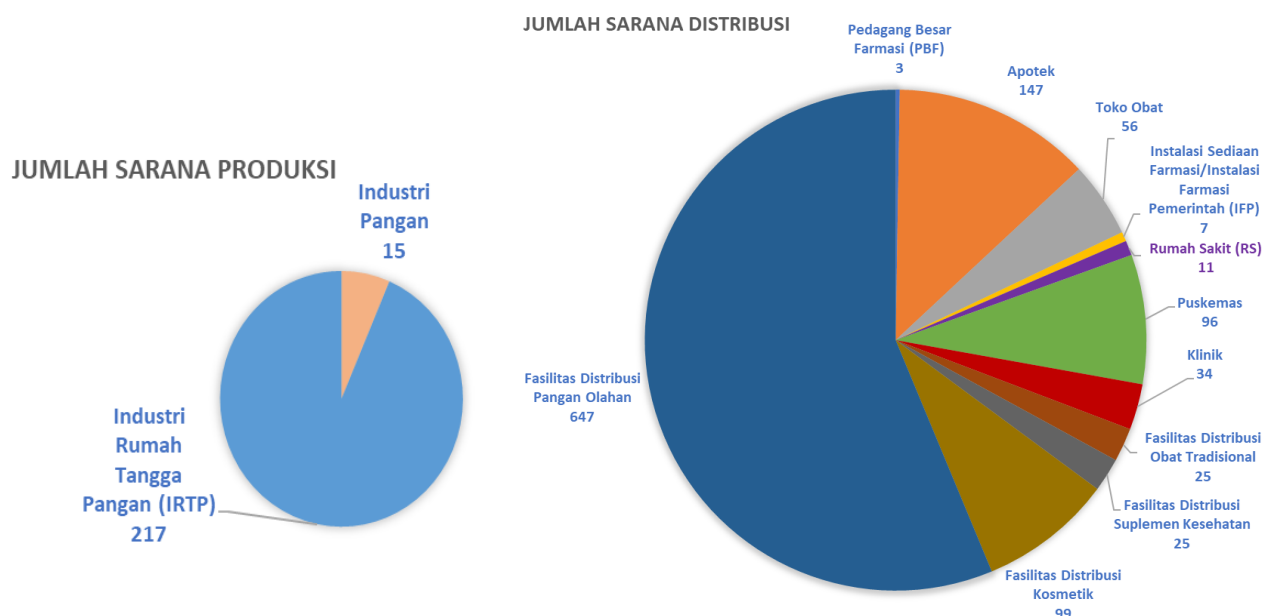
Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Penjualan *online* produk obat dan makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga

diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang ada

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi industri pangan dan industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan serta Bahan Berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada gambar 1.4. di bawah ini.



Gambar 1.4 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2021
Sumber: Monev Tahun 2021 Diolah Penyusun, 2022

Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja

Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun isu strategis tahun 2021 diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya Bencana Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Tanggal 15 Januari 2021 di Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan 3 gedung laboratorium dan Talud BPOM di Mamuju mengalami kerusakan. Dari 3 gedung, 1 gedung mengalami rusak berat dan 2 gedung mengalami rusak ringan. Bencana ini menyebabkan terhambatnya kegiatan perkantoran selama kurang lebih 1 bulan hingga status tanggap darurat dicabut dan cukup berdampak pada kinerja Balai hingga tahun 2021 yaitu progress fisik gedung belum 100%.
2. Pandemi Virus Covid-19 dan Laboratorium Pengujian Covid-19 di BPOM di Mamuju

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju sehingga capaian sampai dengan Tahun 2021 masih ada yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pembatasan-pembatasan dalam berkegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan sekolah-sekolah masih menerapkan *School From Home*. Hal tersebut sudah diatasi dengan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi pertemuan daring. Namun untuk beberapa kegiatan yang dirasa kurang optimal jika mengadakan pertemuan daring karena di beberapa titik di Sulawesi Barat tidak memiliki jaringan internet, maka kegiatan tetap dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ataupun mengurangi jumlah orang per kegiatan.

Semakin meningkatnya jumlah penderita Covid-19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat untuk mempercepat penanganan

pandemi Covid-19 melalui penunjukan beberapa Balai diseluruh Indonesia untuk menjadi Laboratorium Uji Covid-19. Sejak tanggal 12 Juni 2020 Laboratorium Balai POM di Mamuju telah mendapatkan akun all new record untuk melaporkan hasil uji sampel Covid-29 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing pasien Covid-19 yang positif. Kapasitas uji Laboratorium Balai POM di Mamuju adalah 80 sampel perhari dan telah menerima sampel Covid-19 dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasangkayu, Dinkes Mamuju Tengah, Dinkes Mamasa, RSUD Mamuju Tengah, RSUD Mamasa, RSUD Kabupaten Mamuju, RSUD Provinsi Sulawesi Barat, RS Bhayangkara, Labkesda Mamuju, PKM Binanga, PKM Beru-Beru, PKM Tampa Padang, PKM Hinua, PKM Leling, PKM Topore, PKM Tommo, PKM Tapalang, PKM Rangsang, PKM Bambu, PKM Pangale, PKM Tobadak dan PKM Tarailu dengan total 3.855 sampel hingga akhir tahun 2021.

3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi Balai POM di Mamuju pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”k khususnya terkait dukungan pengawasan mutu dan keamanan Obat dan Makanan termasuk pengawasan distribusi Vaksin Covid-19 di Sulawesi Barat

- Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)” khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan

sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai POM di Mamuju dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai POM di Mamuju; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat” melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dan program ke komunitas.
4. Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Diterbitkannya Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Mamuju sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan

penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitasi pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. Balai POM di Mamuju melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Sulawesi Barat.

5. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal
6. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju
7. Semakin banyak produsen peracik kosmetik rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
8. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*
9. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak
10. Balai POM di Mamuju saat ini sudah mempunyai laboratorium pengujian, namun 1 (satu) gedung laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk pengujian Covid-19 memiliki kerusakan berat sehingga laboratorium pengujian Covid-19 harus dipindahkan ke gedung laboratorium pangan. Sehingga Tahun 2021 sebagian pengujian dilakukan di BBPOM di Makassar.
11. Balai POM di Mamuju terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur negara.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa isu yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang dan menyusun strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi. Dengan disusunnya strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini diharapkan pencapaian kinerja berikutnya dapat lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik demi terjaganya keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan. Kemudian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis Balai POM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Pendekatan manajemen kinerja dalam Renstra Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Perjanjian Kinerja. Mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program.

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju. Adapun penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut.

Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan
Saing : bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam*

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha,

dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024, 2020

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan

jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 % dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 %.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting

mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah

telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampumelakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja
Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Pemerintah	SK1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Internal Process Perspective</i>		pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
				Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		berkinerja optimal		
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Sumber: Sasaran Kegiatan, 2022

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

1. Stakeholder Perspective

- Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di

masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro*

justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- 1) Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 86,60% pada akhir tahun 2022
- 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2022
- 3) Persentase obat makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 87% pada akhir tahun 2022
- 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 82% pada akhir tahun 2022
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 89% pada akhir tahun 2022

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

- b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai

konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 71 pada akhir tahun 2022

- c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 92,30 pada akhir tahun 2022
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 76,01 pada akhir tahun 2022
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 88,50 pada akhir tahun 2022

2. Internal Process Perspective

- a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2022

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 71% pada akhir tahun 2022
 - 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 84% pada akhir tahun 2022
 - 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 65% pada akhir tahun 2022
 - 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 65% pada akhir tahun 2022
 - 6) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju, dengan target 4.10 pada akhir tahun 2022
 - 7) Persentase UMKM yang memenuhi standar, dengan target 53,33% pada akhir tahun 2022
- b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:
- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 91,30 pada akhir tahun 2022
 - 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 54 pada akhir tahun 2022
 - 3) Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 18 pada akhir tahun 2022
 - 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 3 pada akhir tahun 2022

- c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2022
 - 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2022
- d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak

pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 98% pada akhir tahun 2022

3. *Learning & Growth Perspective*

2. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di

Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Balai POM di Mamuju, dengan target 65 pada akhir tahun 2022
- 2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 77,40 pada akhir tahun 2022
3. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju, dengan target 82,50 pada akhir tahun 2022

4. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP, dengan target 58 pada akhir tahun 2022
 - 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal, dengan target 2,25 pada akhir tahun 2022
5. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target 93,10 pada akhir tahun 2022

2.5 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2022, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pentingnya perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah RKT 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2020-2024 ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 setelah penetapan Reviu Renstra 2020-2024 tanggal 13 Desember 2021. Berikut ini tabel RKT Tahun 2022.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.60
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.00
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	87.00
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	82.00
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**	89.00
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	71.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		lingkup Balai POM di Mamuju			
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	92.30
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	76.01
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.50
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
				di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	84.00
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4.1
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***	53.33
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	91.30
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di	54.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	18.00
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	3.00
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	98.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	77.40
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.50
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	58.00
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.25
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93.10

Sumber: Dokumen RKT Balai POM di Mamuju Tahun, 2022

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Mamuju menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Adapun Lampiran Menjadi Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.60
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.00
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	87.00
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	82.00
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	71.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		lingkup Balai POM di Mamuju			
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	92.30
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	76.01
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.50
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
				di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	84.00
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4.1
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	53.33
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	91.30
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di	54.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	18.00
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	3.00
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	98.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	65.00
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	77.40
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.50
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	58.00
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.25
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93.10

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju, 2022

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja pertriwulan dan perbulan melalui Aplikasi Simetris Modul e-performance.

2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen perencanaan pencapaian kinerja pertriwulan dan perbulan. Adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan sebagai sarana yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap tiga bulan. Diharapkan dengan adanya RAPK capaian kinerja dapat lebih optimal.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
				bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju							
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
		POM di Mamuju									
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
<i>Internal Process Perspective</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
				waktu di lingkup Balai POM di Mamuju							
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	91.30	91.30	91.30	91.30	91.30
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	20.00	50.00	50.00	50.00	55.00
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	20.00	40.00	40.00	55.00	55.00
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di	-	-	25.00	60.00	60.00	70.00	70.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
				lingkup Balai POM di Mamuju							
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	9.75	20.00	29.50	38.50	46.75	55.25	64.25
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	9.3	16.86	25.00	36.63	48.26	59.30	70.35
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	55.00

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
		Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju									
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target						
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	-	-	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	65.00

Sumber: Dokumen RAPK Balai POM di Mamuju, 2022

2.8 Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2022 berdasarkan DIPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	103,238,500
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	41,374,060
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	103,238,500
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	41,374,060
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	32,583,600

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	62,370,000
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	48,227,000
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	168,307,800
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	927,310,000
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	23,748,000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju		yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	23,748,000
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	38,960,000
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	28,224,000
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	220,790,000
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	1,159,985,000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	65,435,200
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	2,005,290,000
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	230,344,000
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	933,110,000
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	115,197,000
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	101,704,200
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	37,965,080
	SK7	Meningkatnya efektivitas	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	261,640,000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	326,860,000
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	244,570,000
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	447,028,000
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	7,595,743,000
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	224,801,440

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	6,401,518,56
Total					22,014,685,00

Sumber :RAPK Balai POM di Mamuju, 2022

2.9. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pada tahun 2022 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran % Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

Cara Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut.

- 1) NPS Per Sasaran = {%capaian indikator1 + %capaian indikator2 +%capaian indikator)n}/ n

Keterangan :

- Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
- Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator → NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
- Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%

$$2) \text{ NPS per Perspektif} = \{ \% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n \} / n$$

Keterangan :

- Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.

$$3) \text{ NPS Total} = \{ \text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3 \} / 3$$

Keterangan :

- NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan bulanan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam periode pengukuran tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

TRIWULAN LAIN

Tabel 2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2022
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120

Sumber : Paparan BPOM dalam FGD Laporan Kinerja 2021, 2022

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk :

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengimplementasikan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.02.66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM
4. Me-review penetapan target kinerja triwulanan dan tahunan

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BPOM di Mamuju yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Balai POM di Mamuju menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap kelompok substansi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Mamuju
3. Penanggung jawab data di setiap kelompok substansi menginput data kinerja pada *bit.ly data base online* Balai POM di Mamuju secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh Sekretaris Data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada *bit.ly* RAPK-RHPK UPT, aplikasi SMART DJA, BOC, Monev Teptra, Monev Bappenas, Aplikasi SAKTI dan aplikasi simetris modul *e-performace*
5. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Mamuju guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada RAPK triwulan I tahun 2022 sebagai evaluasi capaian kinerja periodik Tahun 2022. Kemudian dilakukan juga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan I tahun 2022 dilakukan terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada RAPK telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan ditetapkan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan, yang semua indikator kinerja yang ditetapkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2021 dihitung berdasarkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) IKU dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tabel 2.4 RAPK Tahun 2022. Berikut ini pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif.

Pada tahun Tahun 2022 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai NPS Total dengan nilai 120.93% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN yang terdiri dari NPS Perspektif Stakeholder sebesar 91.03%, NPS Perspektif Internal Process sebesar 129.77% dan NPS Perspektif Learning and Growth sebesar 142.00%. Jika dilihat per sasaran terdapat 1 Sasaran Strategis (SS) dengan kriteria SANGAT BAIK, 2 SS dengan kriteria BAIK, 1 SS dengan kriteria CUKUP dan 3 SS dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Adapun detail Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Per Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Detail

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.60	86.60	47.00	48.00	97.917	113.07	113.07	SANGAT BAIK
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.00	86.00	6.00	6.00	100.000	116.28	116.28	SANGAT BAIK
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	87.00	87.00	9.00	9.00	100.000	114.94	114.94	SANGAT BAIK
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	10.00	11.00	90.91	110.86	110.86	SANGAT BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							91.03	91.03	BAIK
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	92.30	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju								
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	76.01	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.50	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
Stakeholders Perspective							91.03	91.03	BAIK
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju								
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71.00	71.00	-	-	25.00	35.21	35.21	SANGAT KURANG
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.00	84.00	2.00	2.00	100.00	119.05	119.05	SANGAT BAIK
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	4.00	6.00	66.67	102.56	102.56	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	25.00	32.00	78.13	120.19	120.19	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4.10	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	53.33	10.00	-	-	6.67	66.67	12.50	KURANG
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							90.61	81.59	BAIK
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	91.30	91.30	-	-	92.26	101.05	101.05	BAIK

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	54.00	20.00	-	-	30.00	150.00	30.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	18.00	20.00	-	-	20.00	100.00	20.00	BAIK
IKSK5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	3.00	25.00	-	-	25.00	100.00	25.00	BAIK
SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							112.76	44.01	SANGAT BAIK
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	29.50	-	-	41.30	139.99	41.30	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang	100.00	25.00	-	-	35.35	141.40	35.35	TIDAK DAPAT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju								DISIMPULKAN
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							140.70	38.32	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	98.00	20.00	-	-	35.00	175.00	35.71	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							175.00	35.71	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Internal Process Perspective							129.77	49.91	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	65.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	77.40	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.50	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal							-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	58.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi	2.25	2.25	-	-	1.65	73.33	73.33	CUKUP

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
	Balai POM di Mamuju yang optimal								
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju							73.33	73.33	CUKUP
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93.10	30.00	-	-	63.20	210.66	67.88	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							210.66	67.88	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
<i>Learning and Growth Perspective</i>							142.00	70.61	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
NPS Total							120.93	70.52	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK 2022 Diolah Penyusun, 2022

Analisa setiap indikator dijelaskan dalam sub bab analisis capaian kinerja masing-masing IKU berikut ini.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada SK 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, SK 1 terdiri atas 5 (Lima) indikator kegiatan sebagai berikut.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Berikut akan diuraikan analisa capaian pada setiap Indikator Kinerja SK1.

IKU 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 1 “Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.60	86.60	47.00	48.00	97.917	113.07	113.07	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 48 sampel acak obat yang dilakukan oleh BPOM di Mamuju, dengan hasil 47 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah mencapai target yaitu 113.07% dengan kriteria “Sangat Baik”. Capaian 113,07% Memenuhi Syarat dari pengujian Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menunjukkan bahwa sampling dan pengujian yang dilakukan BPOM

Mamuju di Triwulan I menggambarkan peredaran obat di Sulbar relatif sudah memenuhi persyaratan layak konsumsi.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian pengujian Obat “Sangat Baik” ditunjang oleh ketersediaan reagen, baku pembanding yang cukup, loyalitas dan kerjasama tim, baik dalam penyusunan rencana pelaksanaan, seperti penyusunan pengadaan peralatan dan bahan penunjang, maupun dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium, seperti pembagian jadwal penggunaan alat gelas dan instrument. Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di Triwulan I dilakukan secara onsite namun tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi Covid-19 yang ketat. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).

Sampai saat ini BPOM Mamuju masih memerlukan banyak kebutuhan dalam pemenuhan standar GLP, seperti kebutuhan peralatan instrument terupdate seiring perkembangan parameter uji yang semakin bertambah dan simultan, dibutuhkan support dari pimpinan dan Anggaran. Beberapa Parameter Uji yang belum dapat dilakukan pengujian adalah PK Cemarkan Logam pada OTSKKos, Sterilitas Obat, Pengawet dan Pemanis pada OTSK. Masih membutuhkan tambahan Alat Microwave, HPLC-PDA/RF, SPE+Vacum Manifold.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan pengujian sampel Obat antara lain:

- Regionalisasi Laoratorium BB/BPOM terkait keterbatasan alat yang dimiliki Balai terhadap parameter uji yang memerlukan deteksi Intrumen yang lebih canggih
- Sharing peralatan antar BB/BPOM
- Sampling dan Pengujian produk berbasis Risiko

IKU 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU 2 “Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.00	86.00	6.00	6.00	100.000	116.28	116.28	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Capaian 118,28% Memenuhi Syarat dari pengujian Makanan menunjukkan bahwa sampling dan pengujian yang dilakukan BPOM Mamuju di Triwulan I menggambarkan peredaran keragaman makanan di Sulbar semakin membaik dan memenuhi persyaratan layak konsumsi

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Keberhasilan pengujian Makanan sangat ditunjang oleh ketersediaan reagen, baku pembanding, alat pendukung yang cukup, loyalitas dan kerjasama tim, baik dalam penyusunan renlak kegiatan maupun dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium. pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi SDM dan pembagian jadwal kerja yang sistematis.

BPOM Mamuju masih memerlukan banyak kebutuhan dalam pemenuhan standar GLP, seperti kebutuhan peralatan instrument terbaru/canggih seiring perkembangan parameter uji yang semakin bertambah dan simultan, dibutuhkan support dari dari pimpinan dan Anggaran. Beberapa Parameter Uji yang belum dapat dilakukan pengujian di Lab. Makanan adalah PK Cemaran Logam Hg, Sn, As, karena alat AAS yang dimiliki belum dilengkapi unit HVG/MVU, Simultan Pengawet dan Pemanis. Masih membutuhkan tambahan Alat Microwave, HPLC-PDA/RF, SPE+Vacum Manifold

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan pengujian sampel Obat antara lain:

- Regionalisasi Laoratorium BB/BPOM terkait keterbatasan alat yang dimiliki Balai terhadap parameter uji yang memerlukan deteksi Intrumen yang lebih canggih
- Sharing peralatan antar BB/BPOM
- Sampling dan Pengujian produk berbasis Risiko
- Tetap melaksanakan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB.

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	87.00	87.00	9.00	9.00	100.000	114.94	114.94	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Sampling dan Pengujian produk yang merupakan targeted, dilakukan langsung ke sarana produksi Obat, OTSKKos dan atau sampel kasus terkait penyalahgunaan bahan obat, bahan kimia obat pada produk herbal atau bahan berbahaya pada kosmetik, dengan capaian 114.94% yaitu dari 9 sampel yang selesai diuji semua Memenuhi syarat, capaian ini menunjukkan penyimpangan obat di sarana dan target kasus relatif aman dan layak edar.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Respon masyarakat di Provinsi SulBar terbilang baik dan kooperatif, namun terkadang feedback pelaku usaha sering tidak sesuai timeline, sehingga pengawasan terutama terkait penandaan/label masih harus di lebih diintensifkan.

Untuk dapat menjangkau area pengawasan yang jauh dan atau medan perjalanan yang sulit, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang andal dan anggaran yang memadai, serta pelatihan-pelatihan yang melengkapi pemenuhan kompetensi SDM

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Terkait pemenuhan timeline target sampling dan pengujian, koordinasi lintas sektor, lintas substansi harus mendapat dukungan dan perhatian serius dari pimpinan dan pihak-pihak terkait

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	82.00	82.00	10.00	11.00	90.91	110.86	110.86	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Sampling dan Pengujian produk yang merupakan targeted, dilakukan langsung ke sarana produksi Makanan terkait CPPB dan sampel kasus terkait bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada olahan makanan, dengan capaian 110,86% pada Triwulan I ini menunjukkan penyimpangan pada produk Pangan terutama di sentra IRTP dan target kasus keracunan Pangan relatif aman dan bermutu.

- b.** Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
Tanggapan dan sambutan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM Mamuju sangat baik, namun kesadaran dan pemahaman terhadap bahaya makanan yang tercemar, masih tetap harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, karena peredaran pangan dengan kadar pengawet, pemanis, pewarna yang berlebihan dan berbahaya masih marak ditemukan. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan terus digiatkan dan ditingkatkan untuk pengawasan Obat dan Makanan yang maksimal, Kegiatan KIE yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan segala keterbatasan pemahaman dan kondisi tradisi yang berlaku
- c.** Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
Intensifikasi Kegiatan terpadu Internal dan eksternal, termasuk MoU dengan lintas sektor terkait.

IKU 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-

undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Capaian pangan Fortifikasi Triwulan I masih sangat kurang di karenakan belum dilakukan sampling untuk sampel fortifikasi sehingga belum di lakukan pengujian.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
Telah terlaksana sampling untuk produk minyak goreng sebagai percepatan pemeriksaan sampel Minyak Sawit/Curah, namun hingga Triwulan 1 belum selesai pengujian untuk PK Cemar Logam Pb, Cd karena ketiadaan alat Microwave mengharuskan pengujian

dilakukan secara pengabuan kering yang membutuhkan waktu pada tahap destruksinya. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu Pengujian cemaran logam secara Microwave sesuai Pedoman sampling, namun BPOM Mamuju belum memiliki alat tersebut. Percepatan pengadaan Baku pembanding dan reagen khusus fortifikasi.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Renlak pengadaan alat Microwave dan pembelian beberapa reagen khusus untuk pengujian Vit. A pada Minyak, Asam Folat dan Vit. B1/B2 pada Tepung terigu.

SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 2 (SK2) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN
SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja pada SK2 Triwulan 1 tahun 2022 belum tercapai karena Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja Balai POM di Mamuju target realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar 71.

SASARAN KEGIATAN 3

“Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 3 (SK3) didasarkan pada penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut akan diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK3.

IKU 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Cara perhitungan indikator ini sebagai berikut.

- Dilakukannya survei yang dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *e-mail blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *e-mail blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan

pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

- Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%.
- Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
- Kriteria yang digunakan adalah
 - 75,01 – 100 : sangat puas
 - 50,01 – 75 : puas
 - 25,01 – 50 : kurang puas
 - 0 – 25 : tidak puas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	92.30	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju sampai dengan Triwulan 1 tahun 2022 belum terdapat realisasi karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2022.

IKU 8. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat

terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	76.01	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamujusampai dengan Triwulan 1 tahun 2022

belum terdapat realisasi karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2022.

IKU 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,50	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sampai dengan Triwulan 1 tahun 2022 belum terdapat realisasi karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 4

“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 4 (SK4) didasarkan pada penilaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Pada Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Mamuju mencakup kegiatan pengawasan baik sarana distribusi maupun sarana produksi yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat. Untuk fasilitas sarana distribusi yang dilakukan pemeriksaan adalah fasilitas pelayanan kefarmasian maupun fasilitas penyaluran sediaan farmasi serta fasilitas distribusi produk makanan, sedangkan untuk sarana produksi yang menjadi target pengawasan adalah industri pangan MD serta industri pangan IRTP.

Untuk mencapai SK 4 maka disusun 7 indikator berikut.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK4.

IKU 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Sedangkan yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan adalah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat/ UPT atau lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Total rekomendasi yang diterbitkan atau diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju berdasarkan tabel diatas yaitu sebesar 100% dengan kategori Baik.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
Capaian kinerja baik diperoleh sebagai hasil dari kedisiplinan petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan baik pemeriksaan sarana produksi maupun sarana distribusi dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan maka tetap melanjutkan menjaga kepatuhan petugas dalam membuat surat rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.

IKU 11. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label,

penanganan kasus, pengaduan konsumen. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator kinerja “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* =

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada lintas sektor}} + \frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha}} \right\} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71.00	71.00	-	-	25.00	35.21	35.21	SANGAT KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I sebesar 25 % dengan capaian 35,21% yang termasuk dalam kategori sangat kurang.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Adapun penyebab pencapaian indikator ini yang masih rendah diakibatkan oleh :

- Masih banyaknya stakeholder yang masih belum mampu melaksanakan perbaikan temuan temuan sarana ketika petugas dari BPOM Mamuju melaksanakan pemeriksaan di sarana karena pada umumnya temuan yang menjadi temuan adalah temuan terkait perbaikan fisik yang membutuhkan biaya.
- Masih rendahnya komitmen dari stakeholder (pemerintah daerah dan pelaku usaha) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dari BPOM Mamuju

Adapun hal yang menyebabkan sulitnya pencapaian kinerja yaitu pemanfaatan aplikasi SMART BPOM oleh pemerintah daerah yang masih rendah dan belum dimanfaatkan secara optimal.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilaksanakan yaitu melakukan komitmen bersama dengan pemerintah daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, DPMPTSP dan juga Bappeda yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 bertempat di Hotel D'Maleo Mamuju. Selain itu, juga dilakukan komunikasi kepada lintas sektor dan pelaku usaha terkait temuan ketidaksesuaian selama pengawasan serta lebih intens mengingatkan kepada lintas sektor dan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan melalui komunikasi via Whatsapp serta melakukan pendampingan/bimbingan penyelesaian CAPA.

IKU 12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE).

Indikator kinerja “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
=

$$\frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang di}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.00	84.00	2.00	2.00	100.00	119.05	119.05	SANGAT BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas,dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 119,05% termasuk dalam kriteria sangat baik.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**
Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian yaitu dengan adanya sistem baru terkait registrasi pelaku usaha melalui sistem OSS RBA yang semakin memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB. Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian yaitu dengan adanya sistem baru terkait registrasi pelaku usaha melalui sistem OSS RBA yang semakin memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Rencana tindak lanjut terkait hasil evaluasi yang akan dilakukan adalah melakukan rekrutmen fasilitator yang akan membantu pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi di BPOM serta melakukan kegiatan Bimtek Registrasi Pangan Olahan Jemput Bola yang akan dilaksanakan pada bulan September 2022.

IKU 13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	4.00	6.00	66.67	102.56	102.56	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I 2022 sebesar 66,67% dengan capaian 102,56% yang termasuk dalam kriteria baik.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pencapaian indikator masih memiliki beberapa hambatan yaitu masih sedikit pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk memenuhi aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain itu, jumlah industri pangan MD yang diawasi di wilayah Sulawesi Barat masih sangat sedikit dibandingkan dengan sarana IRTTP yang sangat banyak. Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian adalah melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens serta mengingatkan pelaku usaha untuk selalu memenuhi aspek CPPOB.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi aspek CPPOB serta membangun komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) sebagai pihak yang memberikan rekomendasi penerbitan izin IRTP agar memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP.

IKU 14. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase Sarana Distribusi Obat yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	65.00	65.00	25.00	32.00	78.13	120.19	120.19	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I tahun 2022 sebesar 78,13% dengan capaian 120,19% termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian diatas yaitu sebagian besar sarana yang dilakukan pemeriksaan telah memenuhi aspek persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula hambatan terkait pengawasan sarana yang masih belum mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara merata/meluas diakibatkan masih adanya wilayah yang sulit untuk diakses sehingga masih banyak sarana yang belum dilakukan pengawasan/belum memahami persyaratan terkait pengelolaan obat di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian, selain itu sejak bulan Februari tahun 2022 terjadi pembaharuan terhadap form pemeriksaan sarana distribusi Pangan yang sebelumnya hanya terdiri dari 33 aspek menjadi 96 aspek yang memerlukan pemahaman dan analisis yang lebih dalam oleh petugas yang melaksanakan pemeriksaan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lama.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan evaluasi yaitu :

- Melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan analisis resiko.
- Melaksanakan diseminasi secara internal oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan, sehingga semua petugas yang melaksanakan pemeriksaan sarana dapat mengetahui update peraturan dan juga petunjuk teknis pengawasan sehingga meminimalkan permasalahan dilapangan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian realisasi pengawasan.

IKU 15. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.6

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4.10	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas belum tercapai di Triwulan 1 tahun 2022 karena realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2022.

IKU 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT
- UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT
- UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2) Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3) Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

% UMKM yang memenuhi standar =
Jumlah UMKM yang memenuhi standar/ Jumlah UMKM yang
diintervensi/didampingi pada tahun berjalan

Berikut ini Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT TA 2022.

Tabel 3.16 Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT TA 2022

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April		
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober		
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November		
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan		
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	0	0
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret		
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November		
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November		
Total Progres							
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei		
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September		
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November		
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember		
Total Progres							
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						11	11

Sumber : Monev RAPK Tahun 2022, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4.7

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	53.33	10.00	-	-	6.67	66.67	12.50	KURANG

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebesar 6,67% dengan capaian 12.50% termasuk dalam kriteria kurang.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
Penyebab rendahnya capaian dari indikator ini adalah belum berjalannya program yang masuk kedalam rangkaian kegiatan dalam indikator karena proses perekrutan Fasilitator masih dalam tahap Pendaftaran dan Seleksi Berkas.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- Melanjutkan program perekrutan fasilitator sampai selesai (pemilihan fasilitator dan pendampingan oleh fasilitator kepada pelaku usaha UMKM).
- Merencanakan kegiatan Bimtek Registrasi Pangan Olahan Jemput Bola yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2022, dimana diharapkan pelaku usaha UMKM yang telah didampingi oleh Fasilitator dapat memperoleh rekomendasi dan juga Sertifikat Nomor Izin Edar (NIE)
- Mensosialisasikan kepada pelaku UMKM terkait mekanisme baru proses pendaftaran produk yang sekarang sudah melalui aplikasi OSS RBA.

SASARAN KEGIATAN 5

“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 5 (SK5) didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja yang juga

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK5.

IKU 17. Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Capaian indikator ini berasal dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP BPOM RI.

Indikator kinerja “Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif =

$$\frac{\text{Jumlah responden yang meningkat pemahamannya}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.18 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	91.30	91.30	-	-	92.26	101.05	101.05	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Target efektifitas KIE obat dan Makanan di Wilayah kerja balai POM di Mamuju pada Triwulan I adalah 91,30 dengan realisasi sebesar 92.25 dan termasuk kategori “baik”, indeks tersebut diperoleh dari hasil survey terhadap 12 responden.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi Balai POM di Mamuju telah melakukan survey tingkat efektifitas KIE pada beberapa kegiatan KIE yang telah dilaksanakan di TW I baik secara luring maupun online (melalui media sosial) dengan mengacu pada pedoman singkat penggunaan aplikasi Efektifitas KIE.

Balai POM di Mamuju tetap gencar melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui KIE baik secara langsung ataupun melalui media. Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara langsung selalu melibatkan masyarakat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta kuis interaktif diselingi dengan pemutaran video edukasi sehingga masyarakat lebih mudah memahami materi yang disampaikan, sementara KIE yang dilaksanakan melalui media (media cetak, elektronik dan media sosial) dikemas dan dibuat semenarik mungkin sehingga masyarakat dengan mudah dapat memahami pesan yang disampaikan di dalamnya.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Indeks efektivitas Obat dan Makanan terdiri dari empat indikator dengan nilai indeks masing-masing yaitu :

1. Ragam kegiatan sebesar 89,36 turun 5,82 poin dari nilai 95,19 pada tahun 2021
2. Pemahaman sebesar 90,01 turun 5,98 poin dari nilai 95,99 pada tahun 2021
3. Manfaat sebesar 93,75 turun 3,57 poin dari nilai 97,32 pada tahun 2021
4. Minat sebesar 93,75 naik 1,12 poin dari nilai 92,63 pada tahun 2021

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “manfaat dan minat” yang menunjukkan masyarakat merasakan manfaat dan memiliki ketertarikan terhadap kegiatan KIE Balai POM di Mamuju. Kontribusi terendah berasal dari indikator “Ragam Kegiatan” yang menunjukkan ragam kegiatan KIE Balai POM di Mamuju. Terlihat bahwa nilai indikator ragam kegiatan menurun cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, sehingga Balai POM di Mamuju terus berkomitmen untuk membuat KIE yang lebih beragam baik secara langsung maupun melalui media serta terus berinovasi dalam penyelenggaraan KIE.

IKU 18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan PJAS Aman adalah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader cilik keamanan pangan dari kelompok siswa dan fasilitator keamanan pangan dari kelompok guru. Selain itu akan dilakukan

pengawasan/pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut aman melalui program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Capaian Indikator kinerja “Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman” dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator kinerja tahun 2021.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.19 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	54.00	20.00	-	-	30.00	150.00	30.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada TW I kriteria capaian target untuk Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju mendapatkan kategori “Tidak dapat disimpulkan” dengan realisasi sebesar 150.00.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Balai POM di Mamuju telah melaksanakan koordinasi terhadap Pemerintah Kabupaten yang akan dijadikan sebagai lokus intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2022, sambutan baik dari pihak Pemerintah setempat membuka peluang pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan Advokasi dengan lintas sektor terkait. Balai POM di Mamuju telah memperoleh 14 Data sekolah yang menjadi lokus intervensi dan 68 data sekolah perluasan Tahun 2022.

Adanya dukungan dari lintas sektor terkait (Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Wilayah kementerian Agama Kabupaten yang menjadi lokus intervensi PJAS) serta antusiasme dari pihak sekolah yang menjadi lokus intervensi sehingga di Triwulan I dapat dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan secara hybrid dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan Covid-19.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Balai POM di Mamuju tetap membangun hubungan yang baik dengan pihak sekolah/madrasah lokus intervensi PJAS Tahun 2022 dan sekolah pengawalan dengan melibatkan pihak sekolah terhadap kegiatan yang diadakan oleh Balai ataupun BPOM RI pusat serta tetap memberikan edukasi dan informasi terupdate terkait Obat dan Makanan melalui WhatsApp group.

IKU 19. Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator kinerja ketiga dalam pencapaian Sasaran Kegiatan keenam adalah “Jumlah desa pangan aman” dengan target sebanyak 1 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki kriteria berikut.

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.20 Tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20.00	Januari-April
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5.00	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15.00	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15.00	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10.00	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00	Pre: Mei-Oktober - Post November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10.00	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Desember
9	Pengawasan	10.00	Juni-Desember

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	18.00	20.00	-	-	20.00	100.00	20.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada TW I sebesar 100.00 dengan Kriteria capaian “Baik”

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Balai POM di Mamuju telah melaksanakan koordinasi terhadap Pemerintah Kabupaten yang akan dijadikan sebagai lokus intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2022, sambutan baik dari pihak Pemerintah setempat membuka peluang pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan Advokasi dengan lintas sektor terkait . Balai POM di Mamuju telah memperoleh 6 (enam) yang menjadi lokus intervensi Tahun 2022. kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu Kegiatan Advokasi dengan Lintas Sektor terkait telah membuka ruang diskusi dan pertukaran pendapat antara Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokus intervensi sehingga aspirasi dan harapan dari pemerintah daerah dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program nasional.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Sebagai tahapan awal, terhadap 6 Desa yang ditetapkan menjadi lokus intervensi telah dilakukan komunikasi berkelanjutan dan telah dibuatkan forum komunikasi berupa Whatsapp group. Terhadap 6 Desa telah dikirimkan surat terkait permintaan data kader keamanan pangan desa yang selanjutnya akan dibina oleh Balai POM di Mamuju.

IKU 20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar Aman Dihitung dari jumlah pasar yang:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.
- Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Adapun tahapan dan bobot Indikator sebagai berikut.

Tabel 3.22 Tahapan dan bobot Indikator Pasar Aman Berbasis Komunitas

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan
1	Advokasi	20.00	Januari-April
2	Survei Pasar	5.00	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15.00	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15.00	April-Mei
5	Penyuluhan	10.00	Juni-Juli
6	Kampanye	10.00	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15.00	September- Oktober
8	Pengawasan	10.00	Februari-Oktober
Total		100.00	

Sumber : DO IKU Balai POM di Mamuju, 2022

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	3.00	25.00	-	-	25.00	100.00	25.00	BAIK

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada TW I sebesar 100.00 dengan Kriteria capaian “Baik”

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi Balai POM di Mamuju telah melaksanakan koordinasi terhadap Pemerintah Kabupaten yang akan dijadikan sebagai lokus intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2022, sambutan baik dari pihak Pemerintah setempat membuka peluang pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan Advokasi dengan lintas sektor terkait . Balai POM di Mamuju telah memperoleh satu pasar yang menjadi lokus intervensi Tahun 2022. Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan pasar smart Pasangkayu sebagai Lokus intervensi Tahun 2022, Sebagai penilaian awal, Balai POM di Mamuju telah melakukan survey pasar terhadap kondisi pasar tersebut bersama dengan pihak pengelolanya. Hasil survey menunjukkan akumulasi penilaian pasar smart masuk dalam kategori “cukup”. Hasil tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ke depannya.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Balai POM di Mamuju selanjutnya akan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Pengelola Pasar yang menjadi lokus intervensi agar mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap peredaran pangan di pasar yang dikelolanya.

SASARAN KEGIATAN 6

“Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju yang optimal”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 6 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Berikut dijelaskan analisis setiap indikatornya.

IKU 21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2022

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	29.50	-	-	41.30	139.99	41.30	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Target tahunan untuk pengujian sampel Obat (Obat, OTKOS, Obat Kuasi dan Kosmetik) yang diperiksa dan diuji sesuai standar total tahunannya adalah 400 sampel, target sampling untuk triwulan I tahun 29.5%, sedangkan Realisasi di triwulan pertama adalah 4130%. Capaian untuk triwulan pertama sebesar 139.99% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Beberapa Parameter Uji kritis pada pengujian sampel OTSK dan pengujian sampel kosmetik belum bisa dikerjakan, yaitu :

- PK Cemarkan Logam (Pb dan Cd) terhadap 28 sampel Obat tradisional & 5 sampel Suplemen Kesehatan belum bisa dikerjakan disebabkan belum ada alat microwave dan tidak ada MA uji logam secara pengabuan kering untuk otsk
- Identifikasi Bahan Tambahan Pengawet terhadap 13 sampel OT & 5 sampel SK yang pengujiannya secara SPE lanjut KCKT belum bisa dikerjakan disebabkan belum ada alat SPE
- Kadar Air secara titrasi Karl Fisher terhadap 17 sampel OT dan 3 sampel SK belum bisa dikerjakan menunggu pengadaan Reagen Metanol Dry
- Pengujian Identifikasi Famotidin, Ranitidin, Simetidin (untuk klaim gangguan pencernaan) terhadap 3 sampel OT belum bisa dikerjakan, alat SPE masih tahap pengadaan
- PK logam berat (Hg) sebanyak 22 sampel Kosmetik , PK logam berat (AS) sebanyak 9 sampel kosmetik dan PK logam berat (Pb) sebanyak 6 sampel kosmetik belum bisa dikerjakan disebabkan belum ada alat microwave sebagai alat untuk mendestruksi sampel, selain itu Kelengkapan glassware belum memadai di Lab. Kosmetik dan Reagen

belum memadai termasuk air bebas mineral yg dipakai untuk mengencerkan.

- identifikasi mentol & kamfer terhadap 2 sampel kosmetik belum bisa dikerjakan terkendala pada Kolom GC dan gas helium yang belum ada dan belum dianggarkan tahun ini.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu

- Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
- Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
- Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
- Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syarat baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian
- Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan penandaan baik mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek maupun melakukan sosialisasi peraturan terkait pengawasan penandaan.

c. Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

- a. Percepatan Pengadaan alat microwave sesuai perencanaan tahun 2022
- b. Percepatan pengadaan reagen methanol dry menggunakan anggaran buffer stock
- c. Perencanaan anggaran suku cadang untuk pembelian kolom GC paling lambat ditahun 2023

IKU 22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standardihitungdenganrumusberikut.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2022

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	25.00	-	-	35.35	141.40	35.35	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK DiolahPenyusun, 2022

Target tahunan untuk pengujian sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar total tahunannya adalah 172 sampel, Persentase target sampling untuk triwulan pertama adalah 25%, sedangkan Realisasi di triwulan pertama adalah 35,35%. Capaian untuk triwulan sebesar 141.40% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
- Tidak tersedia Baku pembanding dan reagen Ninhidrin yang dibutuhkan untuk pengujian sampel PK histamine secara KLT.
 - Belum ada alat elisa untuk pengujian PK histamine secara KCKT

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu:

- Percepatan pengadaan reagen dan peralatan penunjang untuk pengujian
- Terus mengawal dalam melakukan pengawasan penandaan produk makanan yang beredar
- Terus melakukan koordinasi dengan petugas sampling dan tim penerima sampel untuk dapat dilakukan sampling tepat waktu
- Melakukan monitoring sampel untuk sampel yang belum memenuhi syarat baik dari evaluasi penandaan maupun pengujian
- Berdasarkan hasil evaluasi, untuk meningkatkan hasil capaian akan dilakukan peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan penandaan baik mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek maupun melakukan sosialisasi peraturan terkait pengawasan penandaan.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- Permintaan Baku ke P3OMN dan permintaan reagen Ninhidrin ke BBPOM Makassar untuk pengujian secara KLT
- Permintaan reagen di anggaran buffer stock

SASARAN KEGIATAN 7

“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 7 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun $n-1$. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 triwulan I tahun 2022 sebagai berikut.

IKU 23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun $n-1$. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	98.00	20.00	-	-	35.00	175.00	35.71	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							175.00	35.71	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Hingga periode triwulan I, Capaian dari Indikator kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah 35%. Adapun total target perkara BPOM di Mamuju pada tahun 2022 adalah 2 perkara, dan realisasi perkara yang telah ditangani hingga periode TW I tahun 2021 adalah 4 perkara; 4 Perkara yang ditangani seluruhnya di Kab. Mamuju.

Dalam periode triwulan I, terdapat 4 SPDP yang telah dikirimkan ke kejaksaan, dan 3 Perkara telah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan (tahap 1) dan 3 Perkara telah menerima Surat petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19). Pada bulan Maret tahun 2022, dan terdapat 1 perkara yang telah memperoleh surat P-21 dari Kejaksaan, dan akan direncanakan untuk proses Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Hal yang menyebabkan tingginya jumlah perkara yang telah ditangani oleh BPOM di Mamuju pada periode TW I adalah informasi tentang adanya tindak pidana dari pihak internal maupun masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Penyidik BPOM di Mamuju sehingga menjadi capaian perkara. Adapun informasi yang

diberikan oleh masyarakat sangat mendukung dalam proses penindakan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

perlu diperhatikan adalah masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani perkara. Balai POM di Mamuju hingga triwulan I baru memiliki 5 (empat) orang PPNS dimana terdapat 2 (dua) PPNS yang berada dalam kelompok substansi penindakan, sebagai koordinator dan salah satu staf belum dilantik menjadi PPNS. Oleh karena itu saat ini sedang diusulkan untuk mempercepat proses pelantikan dan menambah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan PPNS dari BPOM di Mamuju.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan;
- Kuantitas personil yang melakukan penyidikan masih sangat kurang, sehingga kegiatan penyidikan berupa investigasi awal, operasi penindakan dan pemberkasan perkara dilakukan oleh petugas yang sama;
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen;
- Koordinasi yang lebih intens dengan unsur Criminal Justice System di daerah;

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah seringnya dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka meningkatkan keberhasilan kegiatan penindakan, diantaranya dengan Kepolisian, Kejaksaan, BNN, Laboratorium forensic Polri dan stakeholder lainnya. Selain itu dengan adanya kegiatan Intelijen dan adanya informasi-informasi baik dari stakeholder terkait termasuk masyarakat sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain :

- Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui pendidikan dan pelatihan PPNS dan/atau pendidikan dan pelatihan Intelijen.
- Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau workshop, pertemuan investigasi awal dan penyegaran proses penyidikan;
- Meningkatkan koordinasi antar PPNS Badan POM RI, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing balai sebagai bahan pembandingan pada kegiatan investigasi awal dan operasi penindakan maupun dalam proses penyidikan.

SASARAN KEGIATAN 8

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 8 (SK8) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut ini penjelasan masing-masing indikator.

IKU 24. Indeks RB Balai POM di Mamuju

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI)

melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	65.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Indeks RB Balai POM di Mamuju karena nilai akan keluar di akhir tahun setelah penilaian PMP-ZI.

IKU 25. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Nilai AKIP Balai POM di Mamuju dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Tabel 3.28 Komponen Penilaian AKIP

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber : Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	77.40	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai AKIP Balai POM di Mamuju karena nilai akan keluar di akhir tahun. Hingga saat ini sudah dilakukan beberapa perbaikan dalam implementasi SAKIP mengingat form evaluasi penilaian SAKIP berubah.

SASARAN KEGIATAN 9

“Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 9 (SK9) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 tahun 2021 disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut.

IKU 26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.30 Capaian Sasaran Kegiatan 9.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.50	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Capaian Indeks Profesionalitas ASN belum tercapai di triwulan I karena akan terealisasi di akhir tahun oleh Biro SDM BPOM. Namun

telah dilakukan upaya pemantauan peningkatan kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam pelatihan baik daring maupun luring.

SASARAN KEGIATAN 10

“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju”.

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 10 (SK10) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut ini Analisa atas setiap Indikator Kinerja SK10.

IKU 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	58.00	-	-	-	-	-	-	CAPAIAN DI AKHIR TAHUN

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP belum tercapai di triwulan I karena akan terealisasi di akhir tahun. Namun telah dilakukan upaya pemantauan peningkatan baik di pemenuhan alat laboratorium, standar ruang lingkup maupun peningkatan kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam pelatihan baik daring maupun luring.

IKU 28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan

1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
2. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal diperoleh dari Nilai Asesment Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.25	2.25	-	-	1.65	73.33	73.33	CUKUP

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan diatas di tahun 2022 sebesar 1.65 dengan capaian sebesar 73.33%, capaian ini masuk dalam kriteria cukup. Berikut ini detail capaian yang diambil dari Nota Dinas Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Tabel 3.33 Capaian Komponen Pembentuk Indeks pengelolaan data dan informasi

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah $c = a + b$	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah $h = d + e + f + g / 4$	Total Nilai $i = c + h / 2$
		SIPT (a)	SPIMKer (b)		Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)		
		80%	20%							
30	Balai POM di Mamuju	0,8	0	0,8	2	2	3	3	2,5	1,65

Sumber: Nota Dinas Kepala Pusdatin Nomor: TI.05.8.85.04.22.327, 2022

Berdasarkan data diatas, komponen nilai yang terendah yaitu SPIMKer dengan nilai 0 (nol). Sedangkan nilai tertinggi yaitu komponen Dashboard BOC dan Berita Aktual. Tingginya nilai karena adanya penunjukan penganggung jawab setiap komponennya. Sedangkan SPIMker rendah telah dikoordinasikan dengan Pusdatin karena telah dilaporkan tiap waktu setiap bulan oleh masing-masing petugas daerah.

- b.** Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk Pengujian telah dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2022 (Bulan Maret 2022) sehingga pelaksanaan penginputan data dilakukan setelah sosialisasi dilaksanakan. Namun hingga saat ini, SIPT Pengujian masih terbatas sampai pada role Penyelia sehingga nilai SIPT masih tetap belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu
- Adanya cascading indikator kinerja organisasi hingga level individu sangat mendukung kenaikan capaian indikator
 - Konsistensi dan kesadaran setiap pegawai akan target kinerjanya
 - Aplikasi SIPT tahun 2022 yang sosialisasi dan implementasinya secara bertahap menjadi salah satu faktor penunjang terhadap pelaksanaan SIPT. SDM dalam melakukan penginputan awal menyesuaikan informasi dari pusat (Pusdatin Badan POM) terkait kesiapan aplikasi SIPT baik di role Operator, role Supervisor, role Tim Penerima Sampel (TPS), role Manajer Teknis (MT), role Penyelia, dan role Penguji.

- Komunikasi aktif antara Pusat dan Balai, serta sharing knowledge antar Balai
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
- Koordinasi dengan petugas operator, koordinator dan ketua tim terkait untuk meningkatkan konsistensi komunikasi melalui email corporate dan pemantauan terhadap petugas SPIMKER. Selain itu, komponen tiap indikator harus di caccading ke masing-masing Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penanggungjawab dan mempertahankan koordinasi dan komunikasi aktif ke Pusdatin, penanggungjawab kegiatan dan Balai yang memiliki capaian tinggi.

SASARAN KEGIATAN 11

“Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 11 (SK11) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersifat flat dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang bersifat kumulatif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA

2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus Berikut.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM =

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator tahun 2021.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Tabel 3.158 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93.10	30.00	-	-	63.20	210.66	67.88	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel							210.66	67.88	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

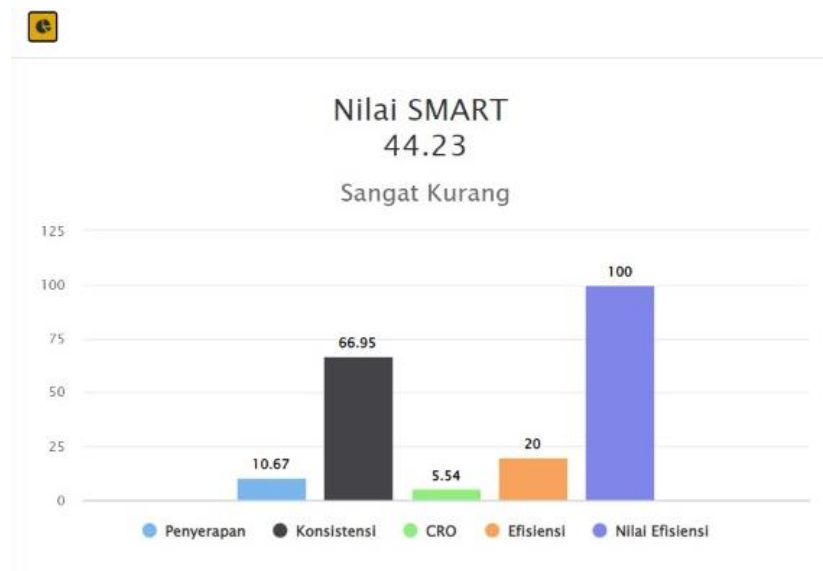
Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju pada triwulan I tahun 2022 sebesar 210.66% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, namun jika dibandingkan dengan target tahunan maka realisasi ini masih

dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut dijelaskan lebih detail terkait indikator ini.

- b.** Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian NKA Triwulan I Tahun 2022 sebesar 44.23 dengan komponen terendah yaitu nilai efisiensi sebesar 53.33. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan anggaran dan capaian output yang belum optimal karena masih berproses dalam triwulan. Berikut ini merupakan grafik capaian NKA.



Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022
Sumber: Smart DJA Per 07 April 2022

Terkait dengan capaian IKPA Tahun 2022 sebesar 84.25 data tersebut diambil pertanggal 31 Maret 2022. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya nilai IKPA yaitu karena penyerapan anggaran yang yang tidak mencapai target sampai dengan Triwulan I 2022, selain itu indikator capaian output juga masih terdapat beberapa output yang progresnya masih 0 (nol). Berikut ini merupakan tabel rinci nilai IKPA Tahun 2022.

Tabel 3.164 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : FEBRUARI

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	178	419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	89.29	60.75	0.00	0.00	100.00	100.00	72.79	42.13	50%	84.25
				Bobot	0	10	0	0	0	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	18.20			
				Nilai Aspek	89.29				100.00			72.79			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendahra PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber : Aplikasi Omspan Per 17 Januari 2022

Rendahnya penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I yaitu karena komposisi anggaran dalam DIPA anggaran belanja modalnya cukup tinggi sedangkan proses realisasinya cukup lama karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Selain itu banyaknya kegiatan terpadu Pusat-Balai dengan pembiayaan sharing dan penyelenggaranya Pusat tidak dilakukan sesuai timeline dan sesuai kesepakatan saat perencanaan kegiatan. Banyaknya kegiatan diluar kendali Balai POM di Mamuju menyebabkan tingginya selisih antara RDP dalam Halaman III DIPA dan realisasinya. Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu secara berkala telah dilaksanakan pemantauan terhadap capaian indikator-indikator pembentuk IKPA terutama terkait penyerapan anggaran dan capaian output yang memiliki bobot tinggi. Selain itu juga dilaksanakan koordinasi dengan bagian terkait yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator IKPA di Tahun 2022 dan aktif berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan

Keuangan dan Kementerian Keuangan di Sulawesi Barat yang bertanggung jawab terhadap nilai IKPA dan EKA.

c. Tindak lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi

Selain rapat bulanan, triwulan dan insidental, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indikator ini yaitu dengan mengadakan pelatihan internal dengan narasumber dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju karena dibutuhkannya update knowledge bagi pegawai terkait dengan adanya aturan dan regulasi terbaru. Selain akan tetap dipertahankan kegiatan rapat koordinasi pertriwulan dan koordinasi berkala dengan masing-masing penanggung jawab per komponen capaian.

3.6 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2022 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ke BPOM RI sebagai Eselon I.

Tabel 3.170 Realisasi Anggaran Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	121,407,000	8,800,076	7.25
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	50,000,000	1,700,858	3.40
3	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	41,324,000	-	0.00
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	913,350,000	145,706,295	15.95
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	144,000,000	28,783,075	19.99
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	121,000,000	53,141,000	43.92
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	127,500,000	55,248,000	43.33
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	2,833,000,000		0.00
9	3165.EBA.962	Layanan Umum	349,690,000	84,027,510	24.03
10	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	500,000,000	-	0.00
11	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	185,770,000	43,481,868	23.41
12	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	784,504,000	65,008,303	8.29
13	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	947,530,000	57,988,335	6.12
14	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	115,197,000	235,000	0.20

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
15	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman [Base Line]	2,032,040,000	15,710,000	0.77
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Di Periksa oleh BB/BPOM	111,662,000	8,899,516	7.97
17	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar [Base Line]	299,130,000	26,705,065	8.93
18	3165.QIA.008	Sampel pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	28,058,000	-	0.00
19	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	124,869,000	7,600,000	6.09
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	388,535,000	28,750,100	7.40
21	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	5,243,533,000	-	0.00
22	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,552,586,000	1,258,924,602	19.21
Jumlah			22,014,685,000	1,890,709,603	8.59

Sumber: Monev Anggaran, 2022

Berikut ini merupakan tabel realisasi anggaran per indikator kinerja.

Tabel 3.171 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	103,238,500.00	8,812,671.00	8.54

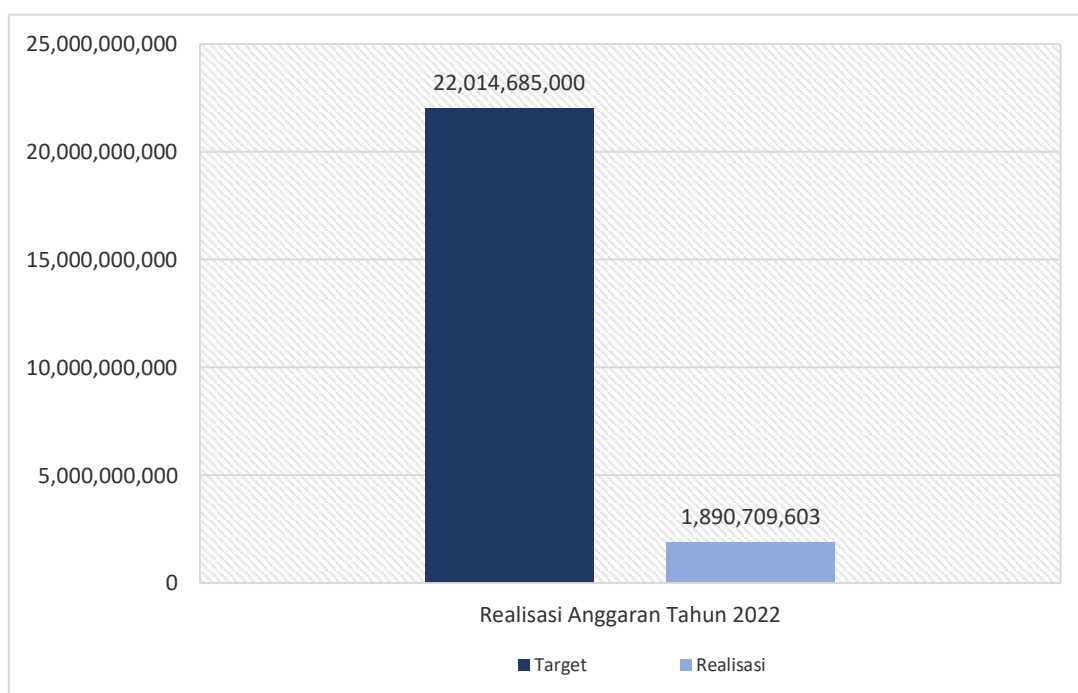
Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	41,374,060.00	2,936,840.00	7.10
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	103,238,500.00	8,812,671.00	8.54
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	41,374,060.00	2,936,840.00	7.10
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*	32,583,600.00	-	0.00
6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	62,370,000.00	23,439,538.00	37.58
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	48,227,000.00	-	0.00
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	168,307,800.00	55,456,110.00	32.95
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	927,310,000.00	76,764,875.00	8.28
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	23,748,000.00	3,384,000.00	14.25
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	23,748,000.00	3,384,000.00	14.25
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	38,960,000.00	1,700,858.00	4.37

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju			
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	28,224,000.00	5,320,000.00	18.85
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	220,790,000.00	24,262,100.00	10.99
15	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	1,159,985,000.00	60,087,500.00	5.18
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65,435,200.00	-	0.00
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2,005,290,000.00	15,710,000.00	0.78
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	230,344,000.00	40,885,000.00	17.75
19	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	933,110,000.00	57,988,335.00	6.21
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	115,197,000.00	235,000.00	0.20
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	101,704,200.00	9,079,722.00	8.93
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	37,965,080.00	3,025,835.00	7.97
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	261,640,000.00	43,481,868.00	16.62

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
24	Indeks RB Balai POM di Mamuju	326,860,000.00	36,956,964.00	11.31
25	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	244,570,000.00	39,937,264.00	16.33
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	447,028,000.00	2,295,510.00	0.51
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	7,595,743,000.00	-	0.00
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	224,801,440.00	70,416,618.00	31.32
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	6,401,518,560.00	1,293,399,484.00	20.20
Total		22,014,685,000	1,890,709,603	8.59

Sumber: Monev Anggaran 2021 Diolah Penyusun, 2022

Berikut ini grafik total realisasi anggaran Tahun 2022.



Gambar 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sumber : Monev Anggaran 2021 Disusun oleh Penyusun, 2022

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen DIPA Balai POM di Mamuju Tahun 2022 sebesar Rp22,014,685,000 dengan realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp1,890,709,603 atau 8.59%. Adapun Realisasi Anggaran Per Belanja sebagai berikut.

Tabel 3.172 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	063-419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUU	178	PAGU	4,533,082.000	9,156,570.000	8,325,033.000	0	0	0	0	0	0	22,014,685.000	
				REALISASI	876,323.735	905,996,868	108,389.000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,890,709.603	
				PERSENTASE	(19.33%)	(9.89%)	(1.30%)							(8.59%)	
				SISA	3,656,758.265	8,250,573.132	8,216,644.000	0	0	0	0	0	0	20,123,975.397	
TOTAL				PAGU	4,533,082.000	9,156,570.000	8,325,033.000	0	0	0	0	0	22,014,685.000		
				REALISASI	876,323.735	905,996,868	108,389.000	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,890,709.603	
				PERSENTASE	(19.33%)	(9.89%)	(1.30%)							(8.59%)	
				SISA	3,656,758.265	8,250,573.132	8,216,644.000	0	0	0	0	0	0	20,123,975.397	

Sumber: Aplikasi Omspan 31 Maret 2022

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala bulanan dan rapat triwulanan
- Revisi anggaran dan kegiatan baik revisi POK atau DIPA secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran kegiatan yang sudah tercapai
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi staf terkait perencanaan, keuangan dan penganggaran
- Telah melakukan koordinasi aktif dengan penanggung jawab kegiatan terpadu terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran pada indikator IKPA maupun EKA sampai dengan triwulan I tahun 2022 antara lain:

- Adanya pembangunan gedung pasca gempa yang belum terlaksana
- Adanya belanja modal lain yang belum terealisasi sampai dengan triwulan I atau pun pertanggungjawabannya melewati triwulan yang bersangkutan
- Adanya beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang nilainya cukup signifikan pelaksanaannya bertahap
- Adanya *self-blocking* yang cukup besar membebani Pagu Anggaran Tahun 2022
- Adanya perubahan dari aplikasi keuangan dari SAS ke SAKTI sehingga ada beberapa proses administrasi yang mengalami perubahan dan membutuhkan penyesuaian

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan rapat rutin dengan tim percepatan pembangunan gedung maupun belanja modal lain untuk memastikan pembangunan dan pengadaan diselesaikan tepat waktu sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan.
- Melakukan update Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan
- Melakukan pemantauan setiap rutin dan segera melakukan revisi atau realokasi anggaran jika kegiatan tidak akan dilaksanakan.
- Mereviu kembali kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dan berkoordinasi secara berkala dengan penanggungjawaban kegiatan pusat
- Peningkatan kompetensi SDM secara berkala termasuk yang ada diberbagai substansi kelompok terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk menyelaraskan realisasi kegiatan dan anggaran yang melibatkan narasumber dari Kanwil DJPb Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju

- Secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing kelompok substansi melalui *google sheet* yang telah disediakan
- Meningkatkan konsistensi penanggung jawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan pertanggungjawaban dengan cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dalam melakukan pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya, Balai POM di Mamuju melakukan perhitungan efisiensi capaian output indikator kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran sesuai kegiatan yang menjadi target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

3.7.1 Analisis Atas Efisiensi Kegiatan Per Rincian Output

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan tingkat efisiensi yang dihitung dengan membandingkan capaian output dan input penggunaan dana. Tabel di bawah ini merupakan tabel pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya yang disajikan perindikator dan per sasaran kegiatan.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ CapaianInput}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% → Efisien
- 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
- 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
- 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
- 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
- 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
- 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
- 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
- 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
- > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Mamuju tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.173 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	IE	TE	Capaian TE	Katagor
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	2.96	1.96	75 %	TIDAK EFISIEN
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	9.80	8.80	75 %	TIDAK EFISIEN
3	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	6.27	5.27	75 %	TIDAK EFISIEN

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	IE	TE	Capaian TE	Katagor
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	1.32	0.32	95 %	EFISIEN
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
9	3165.EBA.962	Layanan Umum	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
10	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
11	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	8.54	7.54	75 %	TIDAK EFISIEN
12	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
13	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
14	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
15	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman [Base Line]	9.33	8.33	75 %	TIDAK EFISIEN
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Di Periksa oleh BB/BPOM	1.78	0.78	90 %	EFISIEN
17	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar [Base Line]	1.60	0.60	92 %	EFISIEN
18	3165.QIA.008	Sampel pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	IE	TE	Capaian TE	Katagor
19	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	3.08	2.08	75 %	TIDAK EFISIEN
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	3.09	2.09	75 %	TIDAK EFISIEN
21	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
22	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.20	4.20	75 %	TIDAK EFISIEN
Jumlah			1.29	0.29	95 %	EFISIEN

Sumber: Monev 2022 Diolah Penyusun, 2022

Pada tahun 2022 Balai POM di Mamuju melaksanakan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan utama / Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 8 kegiatan tidak efisien dan 14 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 8.80. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh GAP serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang tidak sejalan. Realisasi anggaran tidak sejalan karena terjadi beberapa perbaikan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang melebihi tanggal pelaporan triwulan I tahun 2022. Namun jika dilihat secara umum kinerja Balai POM di Mamuju masuk ke dalam kategori Efisien.

3.7.2 Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis. Berikut ini Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja

Tabel 3.174 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	13.25	12.25	75 %	TIDAK EFISIEN
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	16.38	15.38	75 %	TIDAK EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	13.47	12.47	75 %	TIDAK EFISIEN
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	15.62	14.62	75 %	TIDAK EFISIEN
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	7.02	6.02	75 %	TIDAK EFISIEN

No	Indikator Kinerja	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.47	1.47	80 %	TIDAK EFISIEN
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	27.27	26.27	75 %	TIDAK EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	5.44	4.44	75 %	TIDAK EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	10.94	9.94	75 %	TIDAK EFISIEN
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0.00	-1.00	75 %	EFISIEN
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	128.99	127.99	75 %	TIDAK EFISIEN

No	Indikator Kinerja	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	3.13	2.13	75 %	TIDAK EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	17.88	16.88	75 %	TIDAK EFISIEN
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4085.00	4084.00	75 %	TIDAK EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4.63	3.63	75 %	TIDAK EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4.44	3.44	75 %	TIDAK EFISIEN
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	2.15	1.15	86 %	TIDAK EFISIEN
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.34	1.34	84 %	TIDAK EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	3.36	2.36	75 %	TIDAK EFISIEN
TOTAL		4.99	3.99	75 %	TIDAK EFISIEN

Sumber: Monev 2022 Diolah Penyusun, 2022

Pada tahun 2022 Balai POM di Mamuju melaksanakan 29 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari 29 Indikator Kinerja, hanya 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang terhitung pada triwulan I tahun 2022. Secara umum capaian efisiensi berdasarkan indikator kinerja yaitu Tidak Efisien. Dari 19 Indikator Kinerja terdapat 18 Indikator yang Tidak Efisien. Kriteria ini disebabkan penyerapan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan pencapaian output. Hal ini disebabkan serapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 yang terlalu rendah, namun capaian outputnya tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk progress pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju kepada Kepala BPOM RI dan pihak-pihak terkait. Selain itu laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk mencapai kinerja di tahun 2022. Pada tahun 2021 adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 Magnitudo menyebabkan perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan kegiatan karena Gempa Bumi tersebut berdampak terhadap kerusakan talud dan 3 (tiga) gedung laboratorium Balai POM di Mamuju yang sampai saat ini belum selesai dilakukan pembangunan.

Peristiwa gempa bumi tersebut diubah menjadi sebuah titik balik dan kekuatan untuk dapat menjadi lebih kompak dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Tahun 2022 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total sebesar 120.93% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Capaian yang baik ini didukung oleh penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SKP di SIASN yang memfasilitasi *cascading* indikator kinerja hingga level individu.

Pada Triwulan I Tahun 2022, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 22 kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen DIPA. Sampai dengan triwulan I Terdapat 1 Sasaran Kegiatan dengan kriteria SANGAT BAIK yaitu:

- SK7 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Adapun hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 91.03% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM di Mamuju dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2022
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun BPOM di Mamuju sampai triwulan I tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun triwulan I tahun 2022 Balai POM di Mamuju telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 90,61% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 112.76% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 140.70% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi

target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

- Capaian indikator sasaran strategis ketujuh sebesar 175.00% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Namun sampai dengan triwulan I Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2022, namun sampai dengan triwulan I tahun 2022 Balai POM di Mamuju tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
- Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 73.33% dengan kriteria CUKUP. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang akan tercapai di akhir tahun 2022, untuk indikator dengan nilai CUKUP Balai POM di Mamuju harus melakukan upaya yang lebih agar dapat mencapai target tahun 2022. Sedangkan untuk indikator yang capaian di akhir tahun Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan dalam rangka untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 210.66% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan Tata Kelola Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel.
- Dari 22 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 8 kegiatan yang Tidak Efisien. Namun secara total capaiannya telah efisien. Terkait dengan kegiatan yang tidak efisien hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang selisih antara

realisasi kegiatan dan anggarannya terlalu tinggi. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan tingkat efisensi kegiatan Balai POM di Mamuju.

Terkait dengan anggaran, total anggaran DIPA Tahun 2022 Rp22,014,685,000.00 dengan Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp1,890,709,603.00 atau 8.59%. Demi meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Secara aktif melakukan inovasi-inovasi terkini agar tetap bekerja efektif dan efisien
2. Menindaklanjuti revidi terhadap target indikator kinerja ditahun berjalan
3. Melakukan revidi terhadap kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dengan penanggungjawab pusat
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan

LAMPIRAN

1. Target Kinerja Jangka Menengah Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 (Reviu Renstra)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholders Perspective</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	79.90	80.8	83.6	86.6	90	92.3
			IKS K1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.31	78	84	86	88	90
			IKS K1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	80	85	87	88	90
			IKS K1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.07	78	80	82	84	86

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
			IKS K1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	88	89	90	90
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	64.86	69	68	71	75	78
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	IKS K3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	95.08	83	91.1	92.3	93.4	94.6

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	72.00	71	74	76.01	78.01	80.01
			IKS K3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	82.92	85	86.75	88.5	91	92
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	IKS K4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	96.43	78	100	100	100	100
			IKS K4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di	66.23	52.6	64	71	78	85

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		Balai POM di Mamuju		wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
			IKS K4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20.00	80	82	84	86	88
			IKS K4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	50	60	65	70	75
			IKS K4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.87	51	60	65	70	75
			IKS K4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.49	3.11	3.75	4.01	4.25	4.51

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
			IKS K4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	53.33	55.56	61.11
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	96.10	77.63	89.5	91.3	93.1	95
			IKS K5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	13.69	16	40	54	68	82
			IKS K5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	5.00	5	12	18	25	31
			IKS K5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.00	1	2	3	4	5

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	82	100	100	100	100
			IKS K6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	75	100	100	100	100
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	150.00	44	97	98	99	100

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKS K8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	61.05	85	64	65	66	67
			IKS K8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	73.37	80	75.4	77.4	79.4	81.4
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKS K9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.94	75	82	82.5	83	83.5
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	IKS K10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	45.00	70	53	58	63	68

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKS K1 0.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1.70	1.51	2	2.25	2.5	3
	SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKS K1 1.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	86.66	93	92.5	93.1	94.3	95.5

Sumber: Reviu Renstra 2020-2024, 2022

1. Rencana Kerja Tahunan 2022



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR HK.02.02.33A.12.21.2782 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM. 13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : boommamuju@gmail.com , ulokmamuju@gmail.com

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpamamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU



Lintang Purba Jaya



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.02.02.L22.12.21.2782 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ufpmamuju@gmail.com

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Indeks Pelayanan Publik	4.01



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : baommamuju@gmail.com , ulpmamuju@gmail.com

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	53.33
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	65
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	77.4
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.5

No.	Basaran	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawanan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	58
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	93.1

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU



Lintang Purba Jaya

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Mamuju
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si
Jabatan : Kepala Balai POM di Mamuju
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BPOM di Mamuju

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.01
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.01
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	53.33
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
21	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	65
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.4
23	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82.5
24	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	58
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
26	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.1
27	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	54
28	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
29	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
22,014,685,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Mamuju, 16 Desember 2021
Pihak Pertama

Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt., M.Si

3. RAPK Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Mamuju
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	103.238.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	41.374.060,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	103.238.500,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	41.374.060,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	29.771.600,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											71		62.376.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											92.3		48.227.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											76.01		177.349.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM											88.5		927.810.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23.748.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	23.748.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	38.560.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	28.224.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	220.790.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM											4,81		1.159.985.000,00
16.	Persentase UPMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		10	10	10	10	30	30	30	70	70	90	53,35	56.395.500,00
17.	Tingkat efektivitas K2 Obat dan Makanan			91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	2.005.250.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20	50	50	50	55	65	65	100	100	54	230.344.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman			20	40	40	55	55	80	80	90	100	18	633.110.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan uji sesuai standar	9,75	30,00	29,50	38,50	46,75	55,25	64,25	73,75	82,25	90,00	95,25	100	104.516.200,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan uji sesuai standar	9,30	16,66	25	36,63	48,26	58,30	70,35	78,40	86,63	94,19	98,26	100	37.965.080,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	20	30	40	50	25	60	70	80	90	48	261.640.000,00
23.	Indeks RI UPT											65		326.880.000,00
24.	Nilai AKCP UPT											77,4		244.570.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											82,5		447.028.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											58		7.595.743.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	234.801.440,00

IR

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	93.1	6.401.518.960, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	60	65	70	70	70	90	90	100	3	115.197.600, 00
Total														22.014.685.800, 00

Mamuju, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Mamuju



Untang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si

Catatan :

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar aman berbasis komunitas
- Persentase UMKOM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator

4. Matriks Capaian RAPK

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target MAR	Realisasi s.d bulan MARET				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Mamuju	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.60	86.60	47	48	97.92	113.07	113.07
Mamuju	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.00	86.00	6	6	100.00	116.28	116.28
Mamuju	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00	87.00	9	9	100.00	114.94	114.94
Mamuju	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00	82.00	10	11	90.91	110.86	110.86
Mamuju	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89.00	89.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mamuju	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	71.00	-	-	-	-	-	-

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target MAR	Realisasi s.d bulan				
						MARET				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Mamuju	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	-	-	-	-	-	-
Mamuju	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76.01	-	-	-	-	-	-
Mamuju	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.50	-	-	-	-	-	-
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	100.00	-	-	100	100.00	100.00
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00	71.00	-	-	25.00	35.21	35.21

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target MAR	Realisasi s.d bulan MARET				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84.00	84.00	2	2	100.00	119.05	119.05
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00	65.00	4	6	66.67	102.56	102.56
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00	65.00	25	32	78.13	120.19	120.19
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4.1	-	-	-	-	-	-
Mamuju	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	53.33	10.00	-	-	6.67	66.67	6.67
Mamuju	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.30	91.30	-	-	92.26	101.05	101.05

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target MAR	Realisasi s.d bulan MARET				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Mamuju	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54.00	20.00	-	-	30.00	150.00	30.00
Mamuju	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	18.00	20.00	-	-	20.00	100.00	20.00
Mamuju	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3.00	25.00	-	-	25.00	100.00	25.00
Mamuju	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	29.50	-	-	41.30	139.99	41.30
Mamuju	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	25.00	-	-	35.35	141.40	35.35

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target MAR	Realisasi s.d bulan				
						MARET				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Mamuju	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98.00	20.00	-	-	35.00	175.00	35.71
Mamuju	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	65.00	-	-	-	-	-	-
Mamuju	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	77.40	-	-	-	-	-	-
Mamuju	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	82.50	-	-	-	-	-	-
Mamuju	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	58.00	-	-	-	-	-	-
Mamuju	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	-	-	1.2500	55.56	55.56
Mamuju	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.10	30.00	-	-	63.20	210.66	67.88

5. DATA DUKUNG RHPK

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Januari										s.d Februari										s.d Maret																				
							Jumlah sampling	TMK TIE/ legal/ Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label/ Perandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah sampel yang diuji	MS	TMS*	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah sampling	TMK TIE/ legal/ Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label/ Perandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah sampel yang diuji	MS	TMS*	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah sampling	TMK TIE/ legal/ Palsu	kedaluarsa	rusak	TMK Label/ Perandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah sampel yang diuji	us	TMS*	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar					
29	Mamuju	1	Obat	Random	Mamuju	91	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	20	0	0	0	0	20	10	10	0	0	10	10	30	0	0	0	0	30	27	27	0	0	3	27						
						TOTAL	91	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Mamuju	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						TOTAL	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						TOTAL RANDOM DAN TARGETED	112	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	30	0	0	4	30				
						Mamuju	60	6	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	12	0	0	0	4	12	6	5	1	1	6	6	21	0	0	0	4	21	12	11	1	1	9	12
						TOTAL	60	6	0	0	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	12	0	0	0	4	12	6	5	1	1	6	6	21	0	0	0	4	21	12	11	1	1	9	12
						Mamuju	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						TOTAL	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						TOTAL RANDOM DAN TARGETED	86	7	0	0	0	0	1	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	15	0	0	0	6	15	7	6	1	1	6	7	7	29	6	6	29	15	14	1	1	13	15	
						Mamuju	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	120	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	120	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	51	10	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	51	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	51	10	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	171	18	0	0	0	0	0	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	291	26	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	291	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	109	12	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	109	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mamuju	400	38	0	0	0	0	0	4	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL	400	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																																															
1	Pangan (Gulaan Fortifikasi)	Random	Mamuju	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				TOTAL	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Mamuju	39	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				TOTAL	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	120	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Mamuju	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				TOTAL	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	172	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Mamuju	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				TOTAL	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	172	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Fortifikasi	Targeted	Mamuju	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													

a. SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Mamuju	19	19	1	1	0	3	3	0	3	3	0
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	19	19	1	1	0	3	3	0	3	3	0
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Mamuju	98	13	2	0	2	3	1	2	3	1	2
		-	-	-	0			0			0		
		TOTAL	98	13	2	0	2	3	1	2	3	1	2
	Mamuju		117	32	3	1	2	6	4	2	6	4	2
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		117	32	3	1	2	6	4	2	6	4	2

C. SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Mamuju	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	Mamuju	147	14	0	0	0	4	4	0	9	8	1
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		147	14	0	0	0	4	4	0	9	8	1
3	Toko Obat	Mamuju	45	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		45	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Mamuju	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Mamuju	10	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		10	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	Puskemas	Mamuju	97	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		97	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klinik	Mamuju	35	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		35	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Mamuju	37	6	4	2	2	4	2	2	4	2	2
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		37	6	4	2	2	4	2	2	4	2	2
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Mamuju	26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Mamuju	68	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		68	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Klinik Kecantikan	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Mamuju	152	46	0	0	0	4	4	0	15	13	2
	-	-	-	-	0			0			0		
	-	-	-	-	0			0			0		
	TOTAL		152	46	0	0	0	4	4	0	15	13	2
	Mamuju		628	140	4	2	2	12	10	2	32	25	7
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		628	140	4	2	2	12	10	2	32	25	7

D. UMKM

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)		
								Jan	Feb	Mar
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1	0	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April			0	0	0
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober			0	0	0
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November			0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0
								0	10	10
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	0	0	0	0	0
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			0	0	0
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			0	0	0
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0
Total Progres								0	0	0
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			0	0	0
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November			0	0	0
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0
Total Progres								10	10	10
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						11	11	3.33	6.67	6.67

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					TL (pembila ng)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)
Mamuju	1	Persentase keputusan/rekomend asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Mamuju	0	0		2	2		2	2	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	2	2	100.00	2	2	100.00
			Obat Tradisional/ Obat Herbal Alam	Mamuju	0	0		0	2		0	2	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	2	0.00	0	2	0.00
			Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pangan	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mamuju		0	0	0	2	4	50.00	2	4	50.00
			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL		0	0	0	2	4	50.00	2	4	50.00
	2	Persentase keputusan/rekomend asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obat Tradisional/ Obat Herbal Alam	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pangan	Mamuju	0	0		0	2		0	2	
			-	-	-	-		-	-		-	-	
			TOTAL		0	0	0	0	2	0.00	0	2	0.00
			Mamuju		0	0	0	0	2	0.00	0	2	0.00
			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL		0	0	0	0	2	0.00	0	2	0.00
			Mamuju		0	0	#DIV/0!	2	6	25.00	2	6	25.00
			-	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			-	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			TOTAL		0	0	#DIV/0!	2	6	25.00	2	6	25.00

E. % PERKARA

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JANUARI										S.D. FEBRUARI										S.D. MARET												
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
MANUJU	Mamuju	SPDP	2	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3	0	2	0	1.00	0.00%	0.15	15.00%	28.33%	100.00%	28.33	4	0	2	0	1.00	0.00%	0.15	15.00%	35.00%	100.00%	35.00
		Tahap I			0	0	0	0.4	0%							1	0	0.33	0.00	0.4	13.33%						2	0	0.50	0.00	0.4	20.00%			
		P21			0	0	0	0.3	0%							0	0	0.00	0.00	0.3	0.00%						0	0	0.00	0.00	0.3	0.00%			
		Tahap II			0	0	0	0.15	0%							0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%						0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%			
		Total	2	0	0	0								3	0	3	0					0.00%	0	0.00	0.00	4	0	4	0					0.00%	0
	-	SPDP	0	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.4	0%	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00
		Tahap I			0	0	0	0.4	0%							0	0	0	0	0.4	0%						0	0	0	0	0	0.4	0%		
		P21			0	0	0	0.3	0%							0	0	0	0	0.3	0%						0	0	0	0	0	0.3	0%		
		Tahap II			0	0	0	0.15	0%							0	0	0	0	0.15	0%						0	0	0	0	0.15	0%			
		Total	0	0	0	0					0.00%	0	0.00	0	0	0	0				0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0	0	0			0.15	0.00%	0.00%	0
	-	SPDP	0	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0	0.00
		Tahap I			0	0	0	0.4	0%							0	0	0	0	0.4	0%						0	0	0	0	0	0.4	0%		
		P21			0	0	0	0.3	0%							0	0	0	0	0.3	0%						0	0	0	0	0	0.3	0%		
		Tahap II			0	0	0	0.15	0%							0	0	0	0	0.15	0%						0	0	0	0	0.15	0%			
		Total	0	0	0	0					0.00%	0	0.00	0	0	0	0				0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	0	0	0	0			0.15	0.00%	0.00%	0
TOTAL		0	2	0	0	0	0.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	3	0	2	0	1.00	0.00%	0.15	15.00%	28.33%	100.00%	28.33	4	0	2	0	1.00	0.00%	0.15	15.00%	35.00%	100.00%	35.00	
	SPDP														1	0	0.33	0.00	0.4	13.33%						2	0	0.50	0.00	0.4	20.00%				
	Tahap I														0	0	0.00	0.00	0.3	0.00%						0	0	0.00	0.00	0.3	0.00%				
	P21														0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%						0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%				
	Tahap II														0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%						0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%				
	Total														3	0	3	0		0%						4	0	4	0		0%				

F. PJAS

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
						s.d Januari	s.d Februari	s.d Maret
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan	20.00	Jan - April	14	54	0.00	20.00	20.00
2	Sosialisasi keamanan pangan	10.00	Maret - April			0.00	0.00	10.00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15.00	April - Juni			0.00	0.00	0.00
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10.00	April - Nov			0.00	0.00	0.00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15.00	Juli - Sept			0.00	0.00	0.00
	- Pembentukan Tim Keamanan							
	- Intervensi Keamanan Pangan							
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20.00	Agustus - Nov			0.00	0.00	0.00
7	Pengawasan	10.00	Okt - Des			0.00	0.00	0.00
Total skor (Tahun N)		100.00		14	54	0.00	20.00	30.00

G. DESA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)		
					Januari	s.d	sd
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20.00	Januari-April	6	18	0.00	20.00	20.00
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5.00	TW1-TW2			0.00	0.00	0.00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15.00	April-Juli			0.00	0.00	0.00
4 Bimtek Komunitas	15.00	Mei-Oktober			0.00	0.00	0.00
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10.00	Juni-November			0.00	0.00	0.00
6 Intensifikasi Pengawasan	10.00	e: Mei-Oktober- Post Nover			0.00	0.00	0.00
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan	10.00	November-Desember			0.00	0.00	0.00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Desember			0.00	0.00	0.00
9 Pengawalan	10.00	Juni-Desember			0.00	0.00	0.00
Total	100.00		6	18	0.00	20.00	20.00

H. PASAR

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
						Januari	s.d Februari	sd Maret
1	Advokasi	20.00	Januari-April	1	3	0.00	20.00	20.00
2	Survei Pasar	5.00	Januari-April			5.00	5.00	5.00
3	Bimtek Pengelola Pasar	15.00	April-Mei			0.00	0.00	0.00
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15.00	April-Mei			0.00	0.00	0.00
5	Penyuluhan	10.00	Juni-Juli			0.00	0.00	0.00
6	Kampanye	10.00	Juni-Juli			0.00	0.00	0.00
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15.00	September- Oktober			0.00	0.00	0.00
8	Pengawalan	10.00	Februari-Oktober			0.00	0.00	0.00
Total		100.00		1	3	5.00	25.00	25.00